



05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA Pokok	0	0	0	100%	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen DPA Pokok	1 Dokumen	0	0	3,895,000		3,895,000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen IKU, dan Perjanjian Kinerja	100%	0	0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen IKU, dan Perjanjian Kinerja	1 Dokumen	4,195,000	0	0	0	4,195,000	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja	100%				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Kerja	1 Dokumen	4,155,000				4,155,000	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																<b>3,260,803,440</b>
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan bulan gaji dan tunjangan Tambahkan Penghasilan Pegawai (TPP) Tambahkan Penghasilan Satpol PP dan Petugas Damkar ASN Tamsil Bendahara Pengeluaran Tamsil Kasubag. Perencanaan Tamsil Pengelola Barang					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan bulan gaji dan tunjangan Tambahkan Penghasilan Pegawai (TPP) Tambahkan Penghasilan Satpol PP dan Petugas Damkar ASN Tamsil Bendahara Pengeluaran Tamsil Kasubag. Perencanaan Tamsil Pengelola Barang	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	#####	908,707,389	710,299,332	#####	3,238,013,440	
07	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan honor pengelola keuangan (PPK)	29%	35%	24%	12%	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan honor pengelola keuangan (PPK)	12 Bulan					12,790,000	
02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	5,000,000	-	-	-	5,000,000	
Sub Bagian Keuangan																	

		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen	-	5,000,000	-	-	5,000,000
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>																	<b>77,600,000</b>
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang diadakan	0	100%	0	0			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang diadakan	9 Jenis	2,994,000	-	-	-	2,994,000
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan gedung/kantor yang diadakan Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	0	100%	0	0			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan gedung/kantor yang diadakan Jumlah perlengkapan gedung/kantor yang diadakan	8 Unit 3 Unit	6,600,000	225,000	225,000	225,000	7,275,000
03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	100%	0	0	0			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	21 Jenis	3,818,000	-	1,360,000	-	5,178,000
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang Cetak Jumlah Penggandaan	100%	0	0	0			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis Barang Cetak Jumlah Penggandaan	1 Jenis 10000 Lemb	3,585,000	-	-	-	3,585,000
		Persentase ASN yang meningkat kompetensinya								Persentase ASN yang meningkat kompetensinya								

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Koran Harian yang disediakan	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Koran Harian yang disediakan	4 Jenis	450,000	450,000	450,000	450,000	1,800,000	
06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN yang meningkat kuantitasnya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rata-rata pelaksanaan rapat intern Satpol PP dan Damkar	25%	22%	25%	27%	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN yang meningkat kuantitasnya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah rata-rata pelaksanaan rapat intern Satpol PP dan Damkar	24 Kali	13,664,000	13,276,000	14,914,000	14,914,000	56,768,000	
<b>4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															<b>80,195,372</b>	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ASN yang meningkat kuantitasnya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum dalam rangka pelayanan kinerja perangkat daerah	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ASN yang meningkat kuantitasnya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi umum dalam rangka pelayanan kinerja perangkat daerah	12 Bulan	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN yang meningkat kuantitasnya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan rekening air yang dibayarkan Jumlah bulan rekening listrik yang dibayarkan	25%	25%	25%	25%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN yang meningkat kuantitasnya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan rekening air yang dibayarkan Jumlah bulan rekening listrik yang dibayarkan	12 Bulan 12 Bulan	18,450,000	18,450,000	18,450,000	21,245,372	76,595,372	
<b>5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															<b>284,740,000</b>	
			Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara							Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dipelihara							

01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang surat kelengkapan kendaraan Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang surat kelengkapan kendaraan Jumlah kendaraan dinas roda 6 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 6 yang diperpanjang surat kelengkapan kendaraan	31%	23%	23%	23%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang diperpanjang surat kelengkapan kendaraan Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang diperpanjang surat kelengkapan kendaraan Jumlah kendaraan dinas roda 6 yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda 6 yang diperpanjang surat kelengkapan kendaraan	8 Unit 8 Unit 4 Unit 4 Unit 8 Unit 8 Unit	82,580,000	62,580,000	62,580,000	62,580,000	270,320,000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan kantor diperbaiki Jumlah perlengkapan kantor diperbaiki		100%			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN yang meningkat kompetensinya Persentase Ketersediaan Laporan Administrasi, Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan kantor diperbaiki Jumlah perlengkapan kantor diperbaiki	6 Unit 6 Unit	3,210,000	3,290,000	3,940,000	3,980,000	14,420,000	
<b>II PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>																<b>1,737,556,364</b>	
<b>1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah</b>																<b>1,550,056,364</b>	
01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan PERDA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	Jumlah anggota non ASN satpol PP yang terbayarkan asuransi kecelakaan kerja Jumlah pemenuhan jasa non ASN satpol PP	25%	25%	25%	25%	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan PERDA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,	Jumlah anggota non ASN satpol PP yang terbayarkan asuransi kecelakaan kerja Jumlah pemenuhan jasa non ASN satpol PP	12 Bulan 12 Bulan	336,378,791	331,488,591	332,388,591	331,663,591	#####	Bidang Trantibum dan Linmas
02	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan PERDA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	Jumlah pembinaan kelinmasan dalam keamanan dan ketertiban lingkungan	0	100%	0	0	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan PERDA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,	Jumlah pembinaan kelinmasan dalam keamanan dan ketertiban lingkungan	1 Kegiatan	12,356,900	-	-	12,356,900	24,713,800	Sub Bagian Perda
			Jumlah personil yang mengikuti pelatihan fisik							Jumlah personil yang mengikuti pelatihan fisik	450 orang 113 orang						

02	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan PERDA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Jumlah orang yang mengikuti simulasi anggota satlinmas dalam penanganan keamanan dan ketertiban saat terjadi bencana Jumlah pelaksanaan peringkat HUT Damkar Jumlah pelaksanaan peringkat HUT Satpol PP Jumlah pelaksanaan simulasi anggota satlinmas dalam penanganan keamanan dan ketertiban saat terjadi bencana Jumlah pelaksanaan tata upacara sipil Jumlah personel penggerak bendera	31%	29%	24%	16%	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan PERDA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Jumlah orang yang mengikuti simulasi anggota satlinmas dalam penanganan keamanan dan ketertiban saat terjadi bencana Jumlah pelaksanaan peringkat HUT Damkar Jumlah pelaksanaan simulasi anggota satlinmas dalam penanganan keamanan dan ketertiban saat terjadi bencana Jumlah pelaksanaan tata upacara sipil Jumlah personel penggerak bendera	1 Kali 1 Kali 1 Kali 9 orang 9 orang	86,447,000	46,473,000	33,352,000	27,151,000	193,423,000	Sub Bagian Trantibum	
<b>2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>																<b>187,500,000</b>	
01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan PERDA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	Jumlah pemenuhan operasional penegakan Perda dan kebijakan KDH					100%	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan PERDA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	Jumlah pemenuhan operasional penegakan Perda dan kebijakan KDH	1 Kali	-	29,506,000	29,006,000	28,988,000	87,500,000	Sub Bagian Perda
02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan PERDA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	Jumlah pelaksanaan pengawasan internal Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah pengawasan kawasan tanpa asap rokok Jumlah pengawasan peraturan daerah yang dilaksanakan					100%	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase Penegakan PERDA Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara (SPM) Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,	Jumlah pelaksanaan pengawasan internal Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah pengawasan kawasan tanpa asap rokok Jumlah pengawasan peraturan daerah yang dilaksanakan	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan	10,500,000	10,500,000	10,500,000	68,500,000	100,000,000	Bidang Linmas dan Perda
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>																<b>5,023,400</b>	
	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>																<b>5,023,400</b>	
01	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya sosialisasi respon time pemadam kebakaran	0	100%	0	0	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya sosialisasi respon time pemadam kebakaran	1 Kali	-	5,023,400	-	-	5,023,400	Bidang Damkar	
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>																<b>790,843,664</b>	
<b>I</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>																<b>763,850,664</b>	

01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Jumlah bulan pemenuhan asuransi kecelakaan kerja anggota non ASN Damkar Jumlah orang pemenuhan operasional petugas Damkar	25%	25%	25%	25%	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah bulan pemenuhan asuransi kecelakaan kerja anggota non ASN Damkar Jumlah orang pemenuhan operasional petugas Damkar	12 Bulan 12 Bulan	190,962,666	190,962,666	190,962,666	190,962,666	763,850,664	Bidang Damkar	
<b>2</b>		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>															<b>26,993,000</b>	
01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	Terpenuhinya operasional petugas damkar dalam penanggulangan bahaya kebakaran	0	100%	0	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Nonkebakaran) Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Persentase Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Terpenuhinya operasional petugas damkar dalam penanggulangan bahaya kebakaran	2 Kali	-	26,993,000	-	-	26,993,000	Bidang Damkar	
<b>JUMLAH TOTAL</b>																<b>6,275,513,440</b>		

Jeneponto, Maret 2023

**KEPALA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**



**M. NASUHANG, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660325 198703 1 006